

# **PERAN NORWEGIA DALAM PROSES PERDAMAIAN ANTARA GERAKAN SEPARATIS MACAN TAMIL DAN PEMERINTAHAN SRILANKA ( 2002-2010 )**

Digdoyo Wicakono  
Email : [digdoyo.wicaksono@gmail.com](mailto:digdoyo.wicaksono@gmail.com)  
Pembimbing: **Pazli.S.IP.M.Si**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru  
288293-  
Telp/Fak. 0761-63277

## ***Abstract***

*Ethnic conflict happened in Srilanka caused of given different right form Tamil ethnic and Sinhalee ethnic on this country. This conflict has been happened since 1947 until 2003. Were Tamil ethnic is an party whose want to separate from Srilanka government. It happened because Srilanka government doesn't give equal right to Tamil ethnic. Tamil ethnic claim that the government just gived the right just for Sinhalee ethnic. Tamil ethnic through LTTE does many ways to get the equal right from Srilanka government including doing demonstration, kipnap, robbing, gun attacks etc. Srilanka government ever do some intern peace negotiation to both party but they cannot find resolution to resolve the conflict. Finally both party intioted Norway government to become mediator to help resolve the confict. Norway successfully resolve the conflict by sustaining the peace*

*The conflict resolution in the period 2002-2009 shows the changing in the phase of conflict resolution by the existing involvement of Norwegian as the third party in the whole process of conflict resolution, cease fire agreement, conflict symmetricalisation, the formation of Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) and the implementation of a series of conflict negotiation round table between both parties process via economic immediate assistance and joint taks force.*

## **Pendahuluan**

Pasang surut yang cukup lama. Korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak pun tidak sedikit. Baik dari Tamil maupun dari pemerintahan seringkali mendapat kecaman dari negara-negara lain dan organisasi internasional yang concern pada hak-hak asasi manusia.

Konflik bersenjata pertama yang terjadi antara pemerintah dengan LTTE adalah pada tanggal 1983. Kejadian ini berawal ketika diserangnya para demostran anti Tamil oleh LTTE. Akibatnya 16 orang Sinhala tewas dalam kejadian itu. Beberapa hari kemudian, etnis Sinhala membalasnya dengan membunuh tiga ribu orang etnis Tamil. Peristiwa ini disebut sebagai insiden Black July. Sejak saat itu,

pemerintah mengirimkan tentaranya untuk berjaga di wilayah Utara dan Timur Sri Lanka untuk menghindari terjadinya kejadian serupa. Namun pengiriman pasukan tersebut malah memicu terjadinya kekerasan bersenjata kepada etnis Tamil, dan seringkali pelaku kekerasannya adalah tentara itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam setiap pergantian presiden, usaha untuk mendamaikan kedua etnis ini selalu menjadi agenda pada setiap calon, namun tidak banyak yang berhasil diimplementasikan. Contohnya, Presiden R. Premadasa yang berhasil menjalin kerjasama dengan tentara Tamil ketika akan mengusir Tentara Indian Peace Keeping Force di wilayah Utara dan Timur Srilanka. Setelah itu kedua belah pihak menghentikan permusuhan namun tanpa adanya kesepakatan mengenai gencatan senjata. Kemudian Presiden D.B. Wijetunga naik dan mencoba melanjutkan usaha perdamaian, namun tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Pihak LTTE yang merasa tidak puas, menarik diri dan menghancurkan kapal-kapal laut Sri Lanka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dewanto Wisnu, Analisa CSIS volume 5, "Berbagai Dimensi Konflik: India, Srilanka, dan masalah Tamil" Tahun 1988.

<sup>2</sup> The Human Right Implication of Sinhala-Tamil Conflict In Srilanka; Washington; U.S. Government Printing Office; 1984

Situasi antara LTTE dan pemerintahan mulai menunjukkan perubahan di tahun 2001. Pengeboman WTC di Amerika Serikat memicu timbulnya euforia anti terorisme di seluruh dunia. Amerika Serikat meminta kepada negara-negara di dunia untuk bekerjasama melawan teroris di negaranya masing-masing. Wacana mengenai terorisme inilah yang merubah peta konflik antarpemerintah dengan LTTE. Pihak LTTE tidak ingin mendapat label teroris karena semua tindakannya dalam melawan pemerintahan. Karena itulah pada tahun 2001, LTTE menawarkan upaya perdamaian melalui gencatan senjata. Tawaran ini kemudian disetujui oleh Perdana Menteri Ranil Wickremasinghe.

Akhirnya pada tanggal 22 Februari 2002, kedua belah pihak yang bertikai setuju untuk menandatangani MoU, melalui fasilitatornya, Norwegia yang diwakili oleh Joy Westborg. Sesaat setelah ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata tersebut, Jan Peterson, Menteri Luar Negeri Norwegia, langsung mengumumkan hal tersebut di Oslo. Gencatan senjata ini merupakan yang pertamakalinya dilakukan di Srilanka, setelah sebelumnya juga pernah dilakukan kesepakatan perdamaian tahun 1995, namun hanya dapat bertahan selama 100 hari. Aspek yang membedakan

perjanjian perdamaian di tahun 2002 dengan tahun 1995 adalah di lakukannya pemantauan yang dilakukan oleh negara-negara penengah terhadap kedua kubu. LTTE dan pemerintah wajib menyerahkan laporan setiap dua minggu, untuk memantau apakah kedua kubu melanggar perjanjian. Untuk itulah di tahun yang sama di bentuk Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM). SLMM ini merupakan badan yang di bentuk setelah kedua pihak sepakat dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh negara-negara penengah dan menandatangani. Anggota dari SLMM ini ialah Norwegia, Islandia, Swedia, dan Denmark.

Pasca ditandatanganinya MoU damai, stabilitas keamanan di Srilanka relatif lebih tenang. Meskipun tidak aman sepenuhnya, karena masih terjadi beberapa peristiwa, namun tidak besar. Masyarakat sudah berani mendatangi wilayah utara dan Timur dan sudah mulai dilakukannya renovasi infrastruktur di tempat-tempat yang hancur karena konflik. Renovasi ini dapat berjalan karena sumbangan yang di berikan oleh masyarakat internasional yang diketuai bersama oleh oleh Norwegia, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dalam situasi yang berhasil dikendalikan, pertumbuhan ekonomi mulai dapat ditingkatkan. Berdasarkan dokumen PBB, An Agenda for Peace, membina perdamaian terdiri dari berbagai aktifitas yang berkaitan dengan

membina rekonsiliasi, dan perubahan masyarakat. Membina perdamaian merupakan proses panjang setelah konflik yang terjadi mereda atau berhenti. Ini merupakan suatu proses yang terjadi setelah perdamaian dan mempertahankan perdamaian.

Jika kita melihat dalam spektrum konflik dan perdamaian, situasi antara kedua belah pihak sudah berada dalam tahap ketiga, yaitu sudah dimulainya proses termination dan peacekeeping operation, tahap ini dimulai ketika kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan gencatan senjata dan mulai adanya tindakan untuk melakukan perundingan perdamaian. Melakukan perundingan perdamaian dengan pihak lawan merupakan suatu usaha diplomatik untuk mengakhiri kekerasan antara kelompok yang bersengketa, mendorong mereka untuk melakukan dialog damai, dimana akhirnya tercapai kesepakatan damai.<sup>3</sup>

Kabar berakhirnya perang di Sri Lanka ditanggapi secara ambigu oleh masyarakat internasional, termasuk negara-negara tetangga Sri Lanka, terutama India. Negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa memberikan apresiasi kepada pemerintah Sri Lanka karena menumpas terorisme LTTE. Namun

---

<sup>3</sup> Bouffard, Sonia and David Carment. "The Sri Lanka Peace Process: A Critical Review." *Journal of South Asian Development*. 1:2 (2006)

sejatinya mereka tidak memiliki kepentingan dengan terorisme LTTE ini karena sifatnya lokal. Berbeda dengan gerakan Al-Qaeda atau Taliban yang sifatnya global dan telah terbukti membahayakan kepentingan Barat.

Negara-negara Barat, PBB, dan LSM internasional seperti Human Rights Watch justru lebih banyak mempertanyakan pemerintah Sri Lanka yang melanggar HAM karena menewaskan ratusan ribu warga sipil selama perang dan meragukan komitmen untuk mencari solusi akhir dari konflik etnik ini.

Upaya yang dilakukan oleh Norwegia dalam proses perundingan dilakukan secara konsiliasi, negosiasi, dan mediasi.

#### 1. Konsiliasi melalui pembentukan Sri Lanka Monitoring Mission

Selama proses konsiliasi pemerintah Norwegia berusaha untuk mencari akar konflik dan mengurangi pertikaian guna menciptakan perundingan antara pihak Macan Tamil dengan pemerintah Srilanka. Hal ini ditegaskan dengan pembentukan SLMM (*Srilanka Monitoring Mission*) sebuah lembaga yang diketuai oleh Norwegia yang bertugas untuk memberikan laporan kepada negara-negara pendonor mengenai perkembangan proses perdamaian dan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata.

Norwegia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban. Bantuan tersebut berupa bantuan

untuk membangun kembali pemukiman warga yang rusak selama masa konflik, memberikan pengobatan dan konseling untuk menghilangkan trauma di masyarakat. Bantuan ini diberikan agar dapat dibangun langkah *confidence building* antara kedua belah pihak yang bertikai

#### 2. Negosiasi antara etnis Tamil dan etnis Sinhala

Proses negosiasi pihak Macan Tamil dan pemerintah Srilanka dilakukan pada perundingan tahap ketiga. Dalam pihak pemerintah Srilanka menginginkan adanya kantor kepolisian dan pengadilan dimana keanggotaannya berasal dari kedua belah pihak di wilayah provinsi Timur yang banyak diduduki oleh pemberontak Macan Tamil, sedangkan pihak Macan Tamil menginginkan agar pihak pemerintah Srilanka selain anggota kepolisian dan militer agar tidak membawa senjata saat melaksanakan kegiatan politik agar tercipta suasana kondusif saat perundingan berlangsung. Agenda lain yang dibicarakan dalam perundingan tersebut adalah mengenai pemberian bantuan kemanusiaan kepada kedua belah pihak untuk menangani masalah HAM terutama mengenai masalah pembangunan pemukiman para korban konflik.

Dalam proses ini baik pemerintah Srilanka maupun Macan Tamil sepakat untuk menunjuk Norwegia sebagai pihak koordinator dalam

penanganan masalah HAM khususnya di wilayah Jaffna. Pada perundingan tahap kelima ditetapkan bahwa Norwegia menjadi penanggungjawab dalam menyusun agenda penanganan HAM. Pada perundingan tahap akhir yaitu perundingan ke tujuh LTTE mengeluarkan suatu rancangan untuk pengambil alihan kekuasaan dan fungsi pemerintahan pusat di wilayah utara dan timur Sri Lanka kepada pihak mediator yaitu Norwegia, tetapi hal tersebut tidak dapat diterima oleh pemerintah Sri Lanka. Sebagai bentuk aksi protes LTTE menyatakan mundur dari proses perundingan.

### 3. Mediasi Norwegia dalam Konflik etnis di Srilanka

Dalam proses mediasi kedua belah pihak sepakat untuk membentuk *Joint Task Force* yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Karena hal inilah keberadaan lembaga SLMM dalam proses *confidence building* tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pengawasan isi dari kesepakatan senjata dan mempermudah proses perundingan selanjutnya. Dalam menyelesaikan konflik etnis di Srilanka Norwegia terlibat dalam keanggotaan *Sub-commitee De-escalation and Normalisation*. Satuan ini memiliki empat tugas pokok diantaranya untuk menciptakan *high security zone* di wilayah konflik dan banyak terdapat korban. Hal ini dilakukan karena

sering terjadinya aksi teror yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak menyetujui beberapa hasil dari proses perundingan yang berlangsung.<sup>4</sup>

Dalam perundingan tahap keempat kedua belah pihak sepakat membentuk NERF. *The North East Reconstruction Fund* merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan membantu merekonstruksi pemukiman warga yang menjadi korban selama konflik berlangsung. Lembaga tersebut didanai oleh *World Bank*, dimana perwakilan masing-masing pihak menjadi anggota dan bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedua belah pihak dengan menempatkan kembali para korban ke pemukiman asal mereka.

Pada perundingan akhir Norwegia berhasil membantu untuk mengeluarkan sebuah resolusi konflik selain *sustaining the peace process via economic immediate assistance*, yaitu disepakatinya pihak Macan Tamil dapat bergabung dalam sistem pemerintahan Srilanka untuk menghentikan keinginan pihak pemberontak untuk memisahkan diri dari Srilanka.

---

<sup>4</sup> Shedadi K.S, 'Ethnic Self-Determination and the Break-up of States,' *Aselphi Papers* 283, (London:IISS/Brassey's,1993)

### Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Sri Lanka merupakan konflik etnis yang terjadi karena adanya tindakan diskriminasi etnis Tamil oleh etnis Sinhala dalam berbagai sektor. Selama berkonflik kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan konflik secara internal namun selalu mengalami kegagalan, dan kedua belah pihak menunjuk Norwegia sebagai negara mediator dan fasilitator dalam proses perundingan damai antara kedua belah pihak yang bertikai.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia adalah

1. Melakukan konsiliasi yaitu melalui pembentukan *Srilanka Monitoring Mission*:
  - a. Menentukan dimana perundingan damai tersebut dilaksanakan,
  - b. Membangun situasi yang menuju kearah *confidence building* kepada kedua belah pihak.
2. Melakukan negosiasi antara etnis Sinhala dan etni Tamil:
  - a. Merumuskan isi kesepakatan damai antara Macan Tamil dengan pemerintah Srilanka,
  - b. Membantu pihak Macan Tamil untuk bergabung dengan sistem pemerintahan Srilanka sebagai suatu resolusi dari gagalnya pembagian kekuasaan yang diinginkan oleh pihak Tamil,
  - c. Memberikan himbauan agar kedua belah pihak tidak membawa senjata dalam

melakukan aktifitas politik khususnya di provinsi utara dan selatan Srilanka,

- d. Norwegia hanya terlibat dalam proses perundingan dan memberikan pengawasan agar kesepakatan tersebut dapat dijalankan.
3. Melakukan mediasi, pemerintah Norwegia berhasil:
    - a. Membantu merumuskan pembentukan *joint task*,
    - b. Norwegia memberikan bantuan baik bantuan kemanusiaan maupun bantuan finansial bagi kedua belah pihak melalui NERF,
    - c. Membentuk *High Security Zone* dengan meminta pihak Macan Tamil untuk keluar dari sub-committee de scalation and normalization,
    - d. Menentukan *Sustaining the Peace Process Via Economic Immediate Assistance*, dan
    - e. Merumuskan *Road Map of Human Right Issue*.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Mas'ood, Mohtar. (1990)  
*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*,  
Jakarta: LP3ES

Waltz, Kenneth. (1979)  
*Theory of International Politics*,  
New York: Random House.

- Holsti, K.J., 1983. *International Politik* terjemahan. M. Tahrir Azhari. Politik Internasional untuk Analisis Methodes and technique”, (Washington D.C : USIP,1997).
- Holsti, K.J.,1983. *International Politik* terjemahan. M. Tahrir Azhari. Politik Internasional untuk Analisis
- Wickramasinghe, Nira. “Sri Lanka in 2008. Waging War for Peace.” *Asian Survey*. Vol. 49. Issue 1.
- IDMC. *Internal Displacement. Global Overview of Trends and Development in 2007*. Geneva: IDMC, Mei 2015.
- Holst J.Johan.,”*Norway Search For A Nordpolitik*”,*Foreign Affair* 60/fall,1981)
- Jeyaratnam A.Wilson,; *The Break-up of Srilanka; the Sinhalese-Tamil conflict*
- Kriesberg Louis, “*The Development of Conflict Resolution Field*” dalam I.W Zartman dan J.L Rasmussen (eds), “*peacemaking in international Conflict*;
- Senaratne, Jagath P. *The Security Establishment in Sri Lanka. A Case for Reform*, dalam Gavin Cawthra dan Robin Luckhham (ed.). *Governing Insecurity. Democratic Control of Military and Security Establishments in Transitional Democracies*. London: Zed Books, 2003.
- Agustina T. Siregar, ”Konflik Tamil-Sinhala;pengaruhnya terhadap hubungan Sri Langka-India”, 1977-1984,
- Baroto, Aloysius, ”Konflik Sinhala-Tamil dan pengaruhnya terhadap hubungan Srilanka-India”, 1977-1988.
- Bercovitch Jacob, “Preventing Deadly Conflict: The Contribution of International Mediation,” dalam Peter Wallenstein (Ed), “Preventing Voilent Conflict: Past record Berda R.Mats,



“The United States,  
Norway and the Cold  
War”, 1997,

Abdel Salam A El  
Fatih.,”Teori  
Penyelesaian Konflik”  
Kulliyah of Islamic  
Revealed Knowledge  
and Human Sciences  
International Islamic  
University,Kuala  
Lumpur,  
Malaysia,2001